

Studi Literatur Cara Menjadi Penyedia E-Katalog Pada LKPP Sebagai Lembaga Pengadaan Barang Dan Jasa Bagi Pelaku Usaha

Sinta Puspita Sari¹, Amyra Syalsabila², Silvi Yulianti³, Sigit Djalu Purwoko⁴

¹⁻⁴ Universitas Teknologi Digital

Korespondensi penulis: sinta10121656@digitechuniversity.ac.id

Abstract: *The Republic of Indonesia Government Goods and Services Procurement Policy Agency or LKPP RI for short. LKPP has made a big leap in the development of the e-catalog system by starting to involve SOEs. This research focuses on discussing the requirements and steps for business actors to become e-catalog providers. This research uses the literature study method. The results of this study found that the requirements for business qualifications for electronic catalog providers have six qualifications whose final decision is made by the head of LKPP. There are several criteria that must be met by business actors if they want to register their business in the LKPP e-catalog. There are two types of goods and services received, namely, first general goods and services including goods and services needed by K / L, standard or standardizable goods / services, and recurring goods / services needs. The second type of innovation products, namely products determined by the Minister / Head of the Institution in charge of government affairs in the field of research, development, assessment, and application as well as integrated invention and innovation.*

Keywords: *E-catalog, LKPP, Procurement of goods and services, Business actors*

Abstrak: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia atau singkatan dari LKPP RI. LKPP telah membuat lompatan besar dalam pengembangan sistem e-Katalog dengan mulai melibatkan BUMN. Penelitian ini berfokus membahas syarat dan langkah apa saja bagi pelaku usaha untuk menjadi penyedia e-katalog. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa persyaratan kualifikasi usaha penyedia katalog elektronik memiliki enam kualifikasi yang keputusan akhirnya dilakukan oleh kepala LKPP. Adapun beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha jika ingin mendaftarkan usaha mereka di e katalog LKPP. Terdapat dua tipe barang dan jasa yang diterima yaitu, pertama barang dan jasa umum meliputi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh K/L, barang/jasa standar atau dapat distandarkan, dan kebutuhan barang/jasa yang bersifat berulang. Kedua tipe produk inovasi, yaitu produk yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang membidangi urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi.

Kata Kunci: E-katalog, LKPP, Pengadaan barang dan jasa, Pelaku usaha

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaannya memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik dan mengembangkan perekonomian nasional dan daerah. Pada hakikatnya pengadaan barang dan jasa itu merupakan upaya dari pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang atau jasa yang dibutuhkannya, caranya dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar tujuan kesepakatan spesifikasi, harga, waktu, dan kesepakatan lainnya tercapai.

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Kementerian, Lembaga, Perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Menurut

Siahaya, Pengadaan adalah upaya memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan dan dilakukan berdasarkan pemikiran yang logis dan sistematis, mengikuti norma dan etika dan sesuai metode pengadaan yang baku yang dilakukan sebagai pedoman pengadaan (Yuliana, 2022).

LKPP adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Lembaga Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sejarah LKPP bermula dari sebuah unit kerja bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ) sebagai unit kerja eselon II. Dibentuk pada tahun 2005, unit kerja ini bertugas menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah (Wibawana, 2022).

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia atau singkatan dari LKPP RI. LKPP telah membuat lompatan besar dalam pengembangan sistem e-Katalog dengan mulai melibatkan BUMN. Hal ini menjadi perubahan baru setelah sebelumnya sistem e-Katalog hanya berfokus pada aktivitas pengadaan yang bersumber dari APBN/APBD pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (K/L/PD) di Indonesia.

Pelaku usaha yang mengikuti program LKPP dengan memasukan produk mereka ke e katalog akan mendapatkan suatu keuntungan yaitu kemudahan lewat kebijakan dari pemerintah agar produk-produk lokal hasil produksi dari pelaku usaha di Indonesia dapat bersaing dengan produksi luar negeri.

Rumusan Masalah

Pada penelitian ini memiliki rumusan masalah seperti berikut:

1. Apa saja syarat untuk menjadi penyedia e-katalog di lkpp?
2. Bagaimana cara menjadi penyedia e-katalog di lkpp?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan seperti berikut:

1. Untuk mengetahui syarat untuk menjadi penyedia e-katalog di lkpp
2. Untuk mengetahui cara menjadi penyedia e-katalog di lkpp

KAJIAN PUSTAKA

E Katalog

E-Katalog adalah aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), aplikasi ini menyediakan berbagai

macam produk dari pelbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah. e-katalog berinovasi dengan bertambahnya fasilitas “Pelayanan Informasi” pada laman e-katalog untuk kemudahan pengecekan jadwal dan status Kontrak katalog bagi penyedia. Penambahan fitur ini didasari atas kebutuhan penyedia akan informasi terbaru seputar status pemrosesan pada tahap prakatalog (Kurniawan, 2024).

LKPP

LKPP adalah singkatan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ini merupakan Lembaga Pemerintah Non-kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. LKPP dibentuk melalui peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaga Ini dipimpin oleh seorang pejabat yang setingkat Menteri (Ridwan, 2022).

Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa (procurement) perlu diprogramkan oleh pemerintah atau institusi swasta dikarenakan adanya kebutuhan akan suatu barang atau jasa, mulai dari alat tulis kantor (ATK), obat untuk kebutuhan puskesmas dan rumah sakit, bahan bakar kendaraan milik pemerintah, peralatan sekolah, perlengkapan perang untuk instansi militer, perangkat ringan atau berat untuk perumahan, pembangunan, untuk jasa konsultasi serta kebutuhan jasa lainnya.

Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang dibutuhkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan spesifikasi, harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Agar tujuan dari pengadaan barang/jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak Pengguna dan Penyedia haruslah selalu berpatokan kepada filosofi pengadaan barang/jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang/jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku (bpbjsetda, 2021).

Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari suatu perbandingan dan menemukan inspirasi baru. Kajian terdahulu dapat membantu penelitian dan memposisikan

penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagaian ini peneliti mencamtumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Kaimal Arifin (2023) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan E-Katalog terhadap Efektifitas dan Kepuasan Penyedia Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan”. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik Pengumpulan Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara yang dilakukan dengan metode skala likert kepada Penyedia yang bekerja pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sulawesi Selatan. Analisis data pada penelitian menggunakan metode analisis jalur (Path Analisis) yang merupakan alur persamaan yang terhubung secara terstruktur untuk penggunaan yang menggunakan perangkat lunak SmartPLS (Partial Least Square) dengan data panel yang merupakan data primer yang diperoleh berupa data hasil sebaran kuesioner. Hasil penelitian ini adalah penerapan e-Katalog secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas dan kepuasan penyedia. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Penelitian sama terkait pengadaan barang dan jasa

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Metode yang digunakan berbeda, di penelitian ini menggunakan metode studi literatur sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan metode kuantitatif.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal (2020) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Pelaksanaan Ekatalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap Umkm”. Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif dimana penulis menelaah asas-asas serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan secara mendalam. Penelitian yuridis normatif dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan menelusuri, mengkaji, meneliti data sekunder (kepuustakaan) yang berkaitan dengan materi penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil penelitian ini yaitu Perlu adanya peran aktif dan sinergi dari pemerintah melalui LKPP untuk kebijakan dan pengembangan informasi ekatalog bagi UMKM. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Penelitian sama terkait pengadaan barang dan jasa

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Metode yang digunakan berbeda, di penelitian ini menggunakan metode studi literatur sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif dimana penulis menelaah asas-asas serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan secara mendalam.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sarah Salsa Fadillah (2022) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Pembelian Kendaraan Dinas Melalui E-Katalog di Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan”. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan teori yang dibangun dan digunakan melalui data yang diperoleh dilapangan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi supaya mendapatkan informasi yang jelas. Hasil penelitian ini telah diperoleh yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelian kendaraan operasional dinas melalui aplikasi elektronik (e-katalog) di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, yaitu terjadinya pemesanan, lalu pemenuhan, dan akhirnya terjadi pembayaran. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Penelitian sama terkait pengadaan barang dan jasa

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Metode yang digunakan berbeda, di penelitian ini menggunakan metode studi literatur sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang berupa studi literatur atau studi kepustakaan. Studi literatur adalah cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Dengan kata lain, istilah studi literatur ini juga sangat commonplace dengan sebutan studi Pustaka (Salma, 2023).

Hasil kompilasi dari beberapa sumber kepustakaan digunakan untuk menyimpulkan :

1. Apa saja syarat untuk menjadi penyedia e-katalog di lkpp?
2. Bagaimana cara menjadi penyedia e-katalog di lkpp?

Supaya studi pustaka bisa dilakukan dengan baik dan benar sekaligus efisien, berikut beberapa cara yang bisa dilakukan:

1. Mengetahui dan Mencari Tahu Jenis Pustaka yang Dibutuhkan
2. Membaca Jenis Pustaka yang Sudah Ditentukan
3. Melakukan Pengkajian
4. Menyajikan Hasil Studi Kepustakaan (Azis, 2023).

Teknik analisis information studi literatur menekankan pada referensi atau pustaka mana yang sekiranya dibuat sebagai acuan peneliti untuk melakukan penelitian. Hampir semua jenis penelitian pastinya membutuhkan teknik analisis information yang satu ini untuk kebutuhan penelitian.

Baik penelitian yang sifatnya kuantitatif, kualitatif atau blended strategies. Studi literatur sangat penting untuk keperluan akademis. Apalagi tahapan studi literatur dilakukan saat pra penelitian dalam jenis penelitian pada bidang apapun (Maulid, 2022)

HASIL DAN PEMBAHAN

Berdasarkan Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022, persyaratan kualifikasi usaha penyedia Katalog Elektronik adalah sebagai berikut :

- (1) Menyetujui syarat & ketentuan penyedia katalog elektronik.
- (2) Memiliki izin usaha dengan merinci KBLI yang sesuai dengan Etalase Produk. Pencarian KBLI mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang dapat diunduh melalui bps.go.id, atau diakses melalui oss.go.id.
- (3) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) & Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).
- (4) Akta pendirian beserta perubahannya dan Pengesahan dari Kemenkumham (untuk Pelaku Usaha Badan Usaha).
- (5) Tidak sedang dikenakan Status Daftar Hitam.
- (6) Menyampaikan struktur pembentuk harga (apabila dipersyaratkan pada pendaftaran etalase produk).

Terdapat sejumlah kriteria barang jasa yang tersedia pada e katalog LKPP sesuai dengan Perlem LKPP Nomor 7 Tahun 2020, yaitu pertama tipe barang dan jasa umum meliputi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh K/L, barang/jasa standar atau dapat distandarkan, dan kebutuhan barang/jasa yang bersifat berulang. Kedua tipe produk inovasi, yaitu produk yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang membidangi urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi. Produk yang sudah tersedia pada e katalog produk barang/jasa Pemerintah dapat dibeli dengan menggunakan e-Purchasing. Sementara itu, e-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem e katalog. Jadi, e katalog dan e-Purchasing merupakan bagian dari pengadaan secara elektronik atau e-Procurement. Tujuan terbentuknya e-Purchasing yaitu agar semua UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) dapat memilih barang/jasa terbaik dengan efisiensi biaya dan waktu yang cepat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa persyaratan kualifikasi usaha penyedia katalog elektronik memiliki enam kualifikasi yang keputusan akhirnya dilakukan oleh kepala LKPP. Adapun beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha jika ingin mendaftarkan usaha mereka di e katalog LKPP. Terdapat dua tipe barang dan jasa yang diterima yaitu, pertama barang dan jasa umum meliputi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh K/L, barang/jasa standar atau dapat distandarkan, dan kebutuhan barang/jasa yang bersifat berulang. Kedua tipe produk inovasi, yaitu produk yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang membidangi urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi.

SARAN

Berdasarkan pemaparan diatas, kami sajikan beberapa saran bagi para pelaku usaha yang hendak menjadi penyedia e-katalog :

1. Meneliti dan memahami persyaratan dan peraturan yang berlaku LKPP bagi penyedia katalog elektronik
2. Menawarkan produk atau jasa yang inovatif dan memenuhi kebutuhan pengadaan barang/jasa dalam negeri
3. Memastikan sistem katalog online menggunakan teknologi terkini dan mengutamakan keamanan informasi.
4. Memastikan katalog elektronik menyediakan informasi yang lengkap, akurat dan mudah dipahami
5. Menciptakan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra usaha lainnya untuk memperluas jaringan dan meningkatkan peluang kerjasama di bidang pengadaan publik..

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, Y. A. (2023, Mei 10). Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan, Sumber dan Metode. Retrieved from deepublish: <https://deepublishstore.com/blog/studi-pustaka/>
- bpbjsetda, A. (2021, Maret 2). Apa itu Pengadaan Barang dan Jasa? Retrieved from bpbjsetda: <https://bpbjsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/21-apa-itu-pengadaan-barang-dan-jasa#:~:text=Menurut%20Bab%201%20Ketentuan%20Umum,sampai%20diselesaikannya%20seluruh%20kegiatan%20untuk>

- Kurniawan, A. (2024, Juni 29). E-katalog LKPP Tambah Fitur Fasilitas Pelayanan Informasi. Retrieved from lkpp.go.id: <https://latihan-lpse.lkpp.go.id/inaproclat/berita/Aplikasi/E-katalog-LKPP-Tambah-Fitur-Fasilitas--Pelayanan-Informasi#:~:text=Jakarta%20%E2%80%93%20E%2DKatalog%20adalah%20aplikasi,komoditas%20yang%20dibutuhkan%20oleh%20pemerintah.>
- Maulid, R. (2022, Maret 24). Contoh Teknik Analisis Data dengan Studi Literatur. Retrieved from Dqlab: <https://dqlab.id/contoh-teknik-analisis-data-dengan-studi-literatur>
- Ridwan, E. (2022, Oktober 10). LKPP Adalah Apa? Berikut Penjelasan Fungsi, Tugasnya hingga Sejarahnya. Retrieved from detiknews: <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6340045/lkpp-adalah-apa-berikut-penjelasan-fungsi-tugasnya-hingga-sejarahnya>
- Salma. (2023, Maret 17). Studi Literatur: Pengertian, Ciri, Teknik Pengumpulan Datanya. Retrieved from deepublish: <https://penerbitdeepublish.com/studi-literatur/>
- Wibawana, W. A. (2022, Oktober 11). Apa itu LKPP? Pengertian, Sejarah, Tugas dan Fungsi LKPP. Retrieved from detiknews: <https://news.detik.com/berita/d-6341297/apa-itu-lkpp-pengertian-sejarah-tugas-dan-fungsi-lkpp>
- Yuliana, E. (2022, Juli 4). Mengenal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Retrieved from kalbar.bnn.go.id: <https://kalbar.bnn.go.id/mengenal-pengadaan-barang-jasa-pemerintah/#:~:text=Menurut%20Siahaya%2C%20Pengadaan%20adalah%20upaya,yang%20dilakukan%20sebagai%20pedoman%20Pengadaan.>